



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	30 Agustus 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	9	Article Size
Journalist	Anggara Fernando	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► RUAS TOL DALAM KOTA

# BPJT Buka Ruang Untuk Ubah Fungsi

JAKARTA – BPJT menyatakan rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengubah enam ruas tol dalam kota menjadi jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dimungkinkan secara aturan.

Anggara Fernando  
redaksi@bisnis.co.id

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Chazali menyatakan untuk menjalankan rencana itu pemda DKI harus mengajukan surat permohonan ke Menteri Pekerjaan Umum un-

► klausul dalam perjanjian pengusahaan jalan tol yang memungkinkan pemerintah dapat mengambil alih ruas tol yang dibangun swasta

► Rencana pembangunan sebanyak enam ruas tol dalam kota merupakan usulan dari Pemda DKI yang diinisiasi oleh BUMD.

ter menghapus ke enam ruas tol ini dari rencana jalan tol nasional.

Dia mengakui terdapat klausul dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang menyebutkan pemerintah dapat mengambil alih ruas tol yang sedang dibangun swasta sewaktu-waktu bila dirasakan ruas tol yang akan dibangun sudah tidak sesuai lagi dengan rencana dan kebutuhan kota.

"Namun, pengambilalihan itu tidak begitu saja, tetapi entu dengan mengganti investasi yang sudah ditanamkan oleh investor," jelas Gani di Jakarta, Jumat (29/08).

Menurutnya, besaran biaya yang harus diganti oleh pemerintah ditentukan oleh tim penilai independen. Biaya yang diganti termasuk penelitian kelayakan proyek dan pengeluaran intelektual lainnya.

Rencana pembangunan sebanyak enam ruas tol dalam kota merupakan usulan dari Pemda DKI yang diinisiasi oleh badan usaha milik daerah. Pekan lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mengambil alih proyek tersebut dan mengganti tersebut dengan penerapan jalan berbayar apabila keenam ruas jalan tol ini tidak dibangun bersamaan.

## PENERAPAN ERP

Menurut Basuki, penerapan ERP pada ruas tersebut lebih menguntungkan karena pemasukan ERP dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI.

Namun, PT Jakarta Tollroad Development (JTD), pemegang konsensi 6 ruas tol dalam kota Jakarta yang 72 % sahamnya dimiliki oleh BUMD DKI, belum akan mengubah rencana untuk membangun tol dalam kota sekaligus.

Kendala pembebasan tanah, kepadatan kota serta kesanggupan kontraktor menyediakan beton pracetak dalam jumlah besar menjadi tantangan yang dipertimbangkan oleh JTD untuk

## Rencana Ruas Tol Dalam Kota Jakarta

Ruas jalan	Rencana	Operasi
<b>Tahap I (29,67 Km)</b>		
Ruas Semanan-Sunter		2018
Sunter-Pulo Gebang		2019
<b>Tahap II (22,25 km)</b>		
Ruas Duri Pulo - Kampung Melayu		2021
Ruas Kemayoran-Kampung Melayu		2021
<b>Tahap III (17,86 km)</b>		
Ruas Ulujami-Tanah Abang		2022
Ruas Pasar Minggu - Casablanca		2022

Sumber: BPJT

BISNIS/HUSIN PARAPAT

memenuhi permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta agar pembangunan tol ini dapat dibangun sekaligus enam ruas dan selesai pada 2018.

Untuk itu, JTD tetap akan membangun jalan tol ini ruas peruas seperti yang tertuang dalam perjanjian dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). "Sejauh ini kita masih berpegangan kepada kontrak (dengan pemerintah untuk membangun bertahap)," jelas Ngurah Wirawan, Kepala Divisi Komunikasi JTD.

Dalam kontrak yang ditandatangani pada akhir Juli, pemba-

ngunan tol ini terbagi dalam tiga tahap. Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang direncanakan beroperasi tahun 2019.

Tahap II (22,25 km) terdiri atas ruas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana operasi tahun 2021.

Serta tahap III (17,86 km) terdiri atas ruas Ulujami-Tanah Abang dan ruas Pasar Minggu-Casablanca dengan rencana operasi tahun 2022.

Menurut Ngurah, para pemegang saham sudah mengucurkan secara bertahap dana yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol ini. Untuk seksi I senilai Rp15 triliun, JTD akan dikucuri oleh pemegang saham sebesar Rp4,5 triliun secara bertahap sedangkan sisa kebutuhan dana untuk pembangunan akan dipenuhi dengan pinjaman dari Bank Mandiri dan Bank DKI.

"Jika dilakukan pembangunan sekaligus tentu kita kembalikan kepada para pemegang saham (untuk menambah modal)," tambah Ngurah. □